PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI NIAN UE WARI UNTUK PENGELOLAAN DI KAWASAN ILI WENGOT SECARA BERKELANJUTAN

YAYASAN AYU TANI MANDIRI

LAPORAN AKHIR PROYEK
(Desember 2018 - OKTOBER 2019)

BAB I
INFORMASI PROYEK

Wilayah Pendanaan : Area prioritas Flores dan koridor laut Solor Alor

KBA : Ili Wengot

Strategi Direction :

(1) Meningkatkan pengelolaan kawasan (KBA) yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi (SD2)
(2) Mendukung pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas (SD3).

Nama Proyek : Penguatan Kelembagaan Koperasi Nian Ue Wari untuk pengelolaan HKm di Kawasan Ili Wengot secara Berkelanjutan

Nomor Laporan : 2

Periode Waktu : Desember 2018 s/d Oktober 2019

Disampaikan oleh : Thomas Uran (Penanggung Jawab Proyek)

Tanggal : 2019

Hibah CEPF :

(a) Dalam USD :
(b) Dalam Rp : Rp. 270.000.000.

Lembaga Pelaksana : Yayasan Ayu Tani Mandiri

BAB II
RINGKASAN

Kondisi dan Perkembangan Proyek Secara Umum

Dalam kerja sama yang dilaksanakan sejak Desember 2018 s/d Oktober 2019, lembaga pendamping (Yayasan Ayu Tani Mandiri) dapat melaksanakan kerja-kerja yang telah direncanakan pada awal. Kerja-kerja dimaksud focus pada upaya penguatan kelembagaan petani dalam hal ini Koperasi Serba Usaha Nian Ue Wari untuk menjamin keberlanjutan kegiatan konservasi di kawasan Ile Wengot. Kegiatan konservasi yang dilakukan disini juga merupakan bagian dari upaya untuk merehabilitasi habitat burung terancam punah secara global yakni Serindit Flores serta meningkatkan ekonomi petani pengelola.

Dalam rangka mencapai hal tersebut maka langkah paling cepat yang harus diambil adalah mendeklarasikan berdirinya Koperasi Tani Nian Ue Wari. Kelembagaan petani ini telah dilengkapi struktur pengurus dan pengawas, keberadaannya telah dikomunikasikan ke pihak terkait dengan melakukan rangkaian proses untuk mendapatkan nomor registrasi dari Dinas Koperasi UKM Propinsi NTT di Kupang.

Adapun ide dasar mendirikan Koperasi Tani (KSU) Nian Ue Wari adalah untuk memastikan keberlanjutan program konservasi. Namun demikian untuk mencapai hal dimaksud maka upaya peningkatan ekonomi petani pengelola harus terus dilakukan di masa-masa mendatang. Memang harus disadari bahwa upaya konservasi untuk peningkatan ekonomi petani dan peningkatan mutu ekologi sangat diperlukan waktu yang panjang. Para pelaku konservasi harus melakukan kerja secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat. Dengan demikian bisa diharapkan akan terjadi perbaikan ekonomi dan peningkatan mutu layanan alam.

Saat ini koperasi (KSU) Nian Ue Wari sedang dalam proses mendapatkan status legal, setelah diajukan untuk deregister pada Dinas Koperasi UKM Popinsi NTT pada tanggal 10 September 2019. Status legal ini penting agar KSU Nian Ue Wari memiliki akses yang kuat terhadap kegiatan fasilitasi dan pendampingan dari Dinas Perindagkop UKM. Dengan pendampingan ini diharapkan KSU Nian Ue Wari akan semakin kuat dan mandiri menjalankan tugasnya sebagai penggerak kegiatan konservasi dan pengembangan ekonomi masyarakat pengelola HKM.

Capaian - capaian penting yang diwujudkan

Capaian penting yang diwujudkan dalam tahun 2019 adalah:

1) IUP HKM untuk kawasan Kaliraga seluas 90 Ha sudah diterbitkan dengan nomor SK.5239/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2019
2) Terlaksananya Monev pelaksanaan HKM
3) Terlaksananya RAT (Rapat Akhir Tahun) Koperasi Nian Ue Wari
4) Koperasi Nian Ue Wari diajukan untuk mendapatkan nomor registrasi dari Dinas Koperasi Propinsi NTT
5) Terbangunnya kesepakatan lintas pelaku untuk percepatan konservasi di lokasi HKm dengan penanaman bambu betung, kopi robusta dan aneka tanaman lain pada musim tanam tahun 2019 (November – Desember).

Petani HKm sepakat memilih badan hukum koperasi sebagai wadah pengorganisasian didasarkan pada rekomendasi hasil monev dimana ditemukan bahwa peserta HKm agak lamban mewujudkan hutan lestari karena lemahnya koordinasi ketika masih berada di bawah payung organisasi LPMA. LPMA (Lembaga Persekutuan Masyarakat Adat) sebagai pemegang sah IUP HKm ternyata belum mampu melakukan tugas-tugas koordinasi dan mobilisasi yang diperlukan. Hal ini diperparah karena sebagian pengurus LPMA sudah berusia lanjut dan sebagian lagi lebih sering tak ada di kampung karena sudah merantau. Hal ini menjadi semakin rumit karena LPMA sendiri tidak memiliki mekanisme pergantian pengurus yang jelas sehingga sulit untuk menata organisasi sehingga keluar dari masalah yang dihadapi.

Hasil lain yang dicapai selama pelaksanaan project ini adalah adanya Tool Monev untuk memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Tools ini diadaptasikan dari tools yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Perubahan Asumsi dan Resiko, serta respon / tindakan lembaga

Asumsi yang dibangun sejak awal proyek ini dilakukan adalah adanya kerjasama yang baik antar para pihak terutama pihak pemerintah, terutama pemerintahan desa,

dinas teknis di tingkat kabupetan dan provinsi. Melalui kerjasama ini diharapkan terjadi peningkatan ekonomi dan perbaikan ekologi kawasan. Perubahan ekonomi dan ekologi kawasan dimaksud merupakan cita-cita dasar pengelolaan perhutanan sosial dengan skema HKm.

Saat ini perubahan tersebut belum tercapai secara paripurna karena itu diperlukan upaya berkelanjutan. Ketika saat ini dukungan project akan segera berakhir maka keberadaan kelembagaan tani dalam bentuk koperasi merupakan tulang punggung untuk keberlanjutan. Karena itu penguatan kelembagaan tani menjadi perhatian serius dari Yayasan Ayu Tani Mandiri selama melaksanakan project ini.

Upaya ini masih terus dilakukan walaupun program kerja sama dengan pihak eksternal akan berakhir. Semoga dengan peran serta pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM untuk pendampingan KSU Nian Ue Wari semakin baik untuk mencapai tujuan pengelolaan HKM yaitu adanya peningkatan ekonomi kepada petani pengelola dan peningkatan fungsi ekologi. Keberadaan koperasi ini kedepan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan LSM pendamping.

Kaitan antara capaian saat ini dengan tujuan akhir proyek

Adapun tujuan akhir adalah Pengelolaan kawasan hutan di Ili Wengot melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) mendukung kelestarian hutan dan penghidupan masyarakat petani. Hasil yang dicapai saat ini terutama terbangunnya Koperasi Tani Nian Ue Wari adalah hal penting sebagai pijakan untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan melalui skema HKM. Melalui koperasi, masyarakat pengelola akan terorganisir dan terkoordinasikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan secara partisipatif. Dengan cara ini maka diharapkan petani secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan.

BAB III
C A P A I A N

A. Objective : Pengembangan kawasan Ili Wengot melalui skema HKm mendukung kelestarian hutan dan penghidupan masyarakat petani.

- Indikator capaian : 50 % dari 314 Ha lahan HKm ditanami aneka tanaman komoditi agro dan pangan.

  Areal yang berhasil ditanam dengan berbagai jenis tanaman adalah seluas 95 hektar atau sekitar 30,25% dari total luas, masih terpaut 19,75% dari target yang ditetapkan sejak awal yakni 50% dari seluruh luasan areal atau sekitar 157 hektar. Dengan demikian target yang belum terpenuhi mencapai 62 hektar.

  Kegiatan penanaman ini dilaksanakan oleh 236 petani, yang terdiri dari 38 petani di hamparan Baologun dengan luas areal 50 hektar, 173 petani di hamparan Kaliraga dengan luas areal 40 hektar, 25 petani di hamparan Tige/Watu Ruha dengan luas areal 5 hektar.

- 20 % dari penduduk memilki kebun yang ditanami aneka tanaman komoditi.

  Jumlah petani yang menanam dalam tahun 2019 berjumlah 236 orang petani, terdiri dari 38 petani dari hamparan Boalogun, 25 orang petani dari hamparan Watu Ruha/Tige Gulo, 173 orang petani dari hamparan Kaliraga.
  Anakan pohon yang ditanam berjumlah 26.380 anakan yang memenuhi areal HKM seluas 95 hektar. Jenis anakan yang ditanam berjumlah 7 jenis terdiri dari pinang sejumlah 650 anakan, petai sejumlah 475 anakan, sengon sejumlah 855

anakan, kopi robusta sejumlah 19.000 anakan, alpokat sejumlah 400 anakan, cengkeh sejumlah sejumlah 2000 anakan, pala sejumlah 3000 anakan.

B. Out Put :

Out Put 1. Diterbitkannya IUP HKM di Hamparan Kaliraga sebagai satu kesatuan kawasan hutan lindung Ili Wengot.

Indicator dan capaiannya:

- *Adanya dokumen IUP HKM untuk hamparan Kaliraga yang sah*.
  Melalui rangkaian proses, akhirnya IUP HKm untuk hamparan Kaliraga telah diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019, dengan nomor SK.5239/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2019, seluas 90 hektar.

Kegiatan Untuk mendukung capaian Indikator :

1) Fasilitasi penyiapan dokumen untuk pengajuan IUP HKm.

   Penyiapan dokumen permohonan IUP HKm yang dimulai tanggal 7 Desember 2018. Melalui pemerintahan Desa Boru dibangun kesepakatan untuk penyiapan berkas usulan yang dimulai dengan pendataan petani yang sudah terlibat dalam pengelolaan. Semua petani pengelola dilibatkan dalam pertemuan perdana untuk menyamakan persepsi tentang HKm dan model pengelolaannya. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman.

   Dalam pertemuan ini para petani pengelola memahami dan sepakat untuk menerima konsep pengelolaan model HKm. Selanjutnya mereka diminta mengumpulkan salinan KTP sebagai bagian dari kelengkapan berkas permohonan IUP selain dokumen lainnya yang disiapkan oleh Yayasan Ayu Tani. Setelah semuanya lengkap seluruh dokumen diserahkan kepada Pemdes untuk tanda-tangan-, diregister, diajukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2) Fasilitasi kegiatan pemetaan

   Karena peta nerupakan satu kesatuan dokumen permohonan IUP HKM maka pembuatan gambar peta dilakukan pada tanggal 10 Desember 2018. Pembuatan peta dilakukan oleh KPH Flores Timur dengan melibatkan unsur petani pengelola.

3) Fasilitasi pengajuan IUP HKm hamparan Kaliraga ke KLHK dan Dishut NTT

Setelah dokumen permohonan IUP HKm dirampung, maka pada tanggal 14 Januari 2019 dokumen permohonan IUP diantar ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tindak-lanjutnya adalah KLHK melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 20 Maret 2019. Pada tanggal 29 Mei 2019, IUP HKm untuk hamparan kaliraga diterbitkan dengan nomor SK.5239/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2019, seluas 90 hektar.

4) Fasilitasi serangkaian koordinasi dengan masyarakat pengaju IUP HKm dan stakeholder relevan

Sambil menunggu proses dikeluarkannya IUP HKm maka difasilitasi pertemuan Pengurus LPMA pada tanggal 19 Januari 2019 yang menyepakati beberapa hal penting yaitu:

a. pembentukan Tim Kerja yang terdiri dari : P. Lorens Useng SVD (Pastor pendamping, Darius Don Boruk (Kepala Desa/Pengurus), Anton Lado (Pengurus), Frans Sere Liwu (Pemdes Boru), dan Tim Ayu Tani.Tim ini akan mengaktifkan masyarakat tani pengelola melalui motivasi dan pengorganisian petani di 3 desa asal petani pengelola (Boru, Boru Kedang dan Hikong).
b. Untuk memperlancar segala urusan berkenaan dengan petani pengelola dan kegiatann pengelolaan maka disepakati organiser lokal (CO) berdasarkan hamparan: Hamparan Kaliraga (Molen Liwu, Gabriel Goju, Paulus Gelat Liwu. Hamparan Tige Gulo: Kristi, Lena. Hamparan Watu Ruha: Anton Lado, Woda. Hamparan Wolo Mage: Don Boruk, Migu Liwu, Jhon Lewar.
c. Jadwal pertemuan di tingkat desa disepakati: Desa Boru: Selasa (22 Januari 2019), Desa Hikong, Rabu (23/01/2019), Desa Boru Kedang: Kamis (23/01/2019).

Output 2. Penguatan kapasitas kelompok tani HKm Ili Wengot secara keseluuruhan, baik kelompok yang sudah terbentuk maupun yang akan dibentuk.

Indicator dan capaian:

- *Kelompok tani yang dibentuk pada proyek pertama dan kedua terlibat dalam kegiatan penguatan kapasitas.*

  Pada periode project yang pertama dan kedua terdapat 106 petani (anggota KSU Nian Ue Wari) terlibat dalam kegiatan penguatan kapasitas yang diselenggarakan melalui project tahap 3 ini. Petani tersebut berasal dari Desa Boru Kedang

sejumlah 38 orang, dari Desa Boru sejumlah 24 orang, dari Desa Hikong sejumlah 44 orang.

Adapun jenis kapasitas yang ditingkatkan adalah:

- keterampilan teknis dan pemahaman tentang pembuatan sketsa dan rencana pengelolaan kawasan
- pengetahuan tentang regulasi berkaitan dengan pengelolaan areal HKM
- Keterampilan teknis dalam memilih jenis tanaman dan teknik penanaman berbagai jenis bibit tanaman di areal HKM.
- Keterampilan teknis dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan dalam areal HKM
- Pengetahuan tentang peran organisasi tani (koperasi) dalam pengelolaan areal HKM

- *Kelompok tani yang terbentuk pada proyek fase tiga terlibat dalam kegiatan penguatan kapasitas.*

  Total petani yang terorganisir dalam projek tahun 2019 berjumlah 173 orang yang terorganisir dalam 8 kelompok.

  Adapun kegiatan peningkatan kapasitas dan pemahaman yang dilakukan selama periode project ini adalah:

  - pemahaman untuk menggambar skesta hamparan terdiri dari 7 petani,
  - pemahaman tentang regulasi pengelolaan / penanaman pada areal HKm sebanyak 110 petani,
  - keterampilan melakukan monev sebanyak 19 petani dan yang
  - pemahaman tentang pentingnya organisasi koperasi sebanyak 9 orang.

  Penguatan kapasitas yang dianggap penting dilakukan pada kesempatan mendatang adalah berkaitan dengan peningkatan kapasitas anggota, kapasitas pengurus, dan kapasitas pengawas koperasi. Hingga saat ini pengurus dan pengawas belum mampu melakukan tugasnya secara efektif. Hal ini disebabkan karena mereka belum memiliki kapasitas memadai. Fungsi kepengurusan dan kepengawasan selama ini dibantu oleh Ayu Tani, termasuk untuk mempersiapkan pelaksanaan RAT.

  Untuk para petani, kapasitas yang dibutuhkan adalah berkaitan dengan keterampilan penanganan pasca panen komoditi, kapasitas pengolahan pangan, kapasitas untuk pemasaran komoditi secara bersama.

Aktifitas 1. Pengorganisasian petani di hamparan Kaliraga menjadi kelompok tani pengaju IUP HKm

Dilakukan tanggal 9 Februari 2019, menghadirkan 66 petani yang terorganisir dalam 8 kelompok. Factor yang mendukung kegiatan ini dilaksanakan adalah Voluntir yang memfasilitasi pertemuan adalah orang dari kalangan petani sendiri lebih membantu petani memahami lebih baik karena mengerti konteks sosial setempat yang masih menghargai hak adat atas hamparan Kaliraga. Dengan contoh IUP HKm sama seperti SIM untuk petani lebih membuat orang mengerti untuk apa IUP HKm.

Aktivitas 2. Sosialisasi konsep HKM kepada kelompok tani di hamparan Kaliraga dan kelompok – kelompok yang sudah dibentuk.

Dilaksanakan tanggal 22 januari 2019, dihadiri 110 orang 16 di antaranya perempuan. Petani pada awal berkeberatan untuk menerima HKm karena mereka sudah dan sedang kelola. Namun setelah dijelaskan voluntir dengan mengibaratkan IUP HKM seperti SIM yang dimiliki oleh sopir. Bila kita punya kendaraan sendiri tapi harus punya SIM apabila berjalan di jalan raya. Dengan penjlesan itu petani memahamai konsep HKm karena berada di kawasan hutan negara.

Aktivitas 3. Fasilitasi pengembangan pembibitan untuk tanaman perkebunan dan tanaman untuk konservasi untuk semua kelompok tani yang terbentuk.

Pembibitan untuk petani Kaliraga disepakati untuk dilaksanakan pada 3 lokasi, sebagai berikut:

Lokasi	Jumlah dan Jenis bibit					
	Kopi	Alpokat	pinang	pete	sengon	bambu
Ayu Tani	4.000	300	-	-	-	-
Hikong	1.500	-	-	-	-	-
Boru Kedang	5000	300	600	500	150	-
Umum	-	-	-	-	-	500
Jumlah	10.500	600	600	500	150	500

Dengan demikian bibit yang siap ditanam pada musim tanam tahun 2019 berjumlah 12.850 anakan yang terdiri dari 6 jenis dengan jumlah masing-masing seperti terlihat pada tabel di atas.

Aktivtas 4. Fasilitasi kegiatan penanaman termasuk pembuatan skesta hamparan dan skesta kebun untuk hamparan Kaliraga dan penanaman pada lokasi yang diperuntukan untuk konservasi.

Kegiatan penanaman dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2019 dengan melibatkan para pihak antara lain: unsur polisi, TNI, dan utusan Pemdes. Jenis tanaman yang ditanam adalah kopi robusta. Untuk persiapan penanaman pada akhir 2019, telah dipersiapkan bibit melalui kegiatan pembibitan di tingkat kelompok yang terdiri kopi sebanyak 12.000 anakan, pinang sebanyak 600 anakan, pete 500 anakan, alphokat 300 anakan, dan sengon 150 anakan.

Aktivtas 5. Memfasilitasi pelatihan analisa usaha perkebunan

Dilaksanakan tanggal 30 April 2019 dengan melibatkan 22 petani bertempat di sekretariat Ayu Tani.

- Penilaian terhadap jenis tanaman yang akan dikembangkan berdasarkan beberapa pertimbangan :

No	Penilaian	Komoditi						
		Kopi	Alpkd	Pete	Rbtan	Mnga	Jeruk	Mntga
1	Daya tumbuh	I	I	I	I	I	I	I
2	Punya nilai ekonomis	I	I	I	II	I	II	I
3	Punya nilai ekologis							
4	Kebal hama	I	I	I	I	I	III	
5	Kebal penyakit							
6	Unggul produksi							
7	Tahan topan	I	II					
8	Panen buah/ bukan kayu							

- Melihat kalender musim panen dari jenis tanaman yang akan dikembangkan. Ini bertujuan untuk mengutamakan jenis tanaman yang bisa menghasilkan atau memberi nilai ekonomi kepada petani secara utuh dalam setiap bulan. Dianjurkan agar tidak ada bulan yang lowong panen. karena kebutuhan petani ada pada semua musim

No	Jenis	Jan	Feb	Mar	Apl	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Kopi						X	X					
2	Alpokad	X	X										
3	Rambutan		X	X									
4	Mangga											X	X
5	Mentega	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Durian	X	X	X	X								
7	Nenas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Pete	X	X	X									X

9	Kelapa												

- Analisis usaha HKm untuk lokasi 1 ha

No	Jenis	Populasi	Produksi/ phn (kg)	Rata2 Pendapatan	Bulan
1	Kopi	200	400	14.000.000	
2	Alpokat	20	-	10.000.000	
3	Mentega	20		10.000.000	
4	Kelapa	100	1.500 kg	5.250.000	
5	Mangga	20		10.000.000	
6	Teras (Nenas, Kelor)	*Disesuaikan*		-	
7	Pinang			-	
				49.250.000	

Output 3. Penguatan kelembagaan Koperasi Nian Ue Wari untuk keberlanjutan pengelolaan HKm.

Indicator:

- *Tersedia alat monitoring program dan terlaksananya monitoring dan evaluasi program.*

  Alat monev yang dipakai saat ini adalah alat yang dihasilkan oleh KLHK. Masyarakat dapat menggunakan secara mandiri sampai mampu menemukan kesimpulan tentang tingkat keberhasilan kelompok hamparan dalam implementasi kegiata pengelolaan hamparan. Capaian tertinggi dari masing-masing komponen pada masing-masing hamparan baru mencapai 65%. Itu berarti selama kurang lebih selama 7 tahun sejak diterbitkannya IUP HKm, masyarakat belum efektif melakukan kegiatan pengelolaan. Masalah utama terletak pada ketiadaan daya pendorong dari LPMA yang kepengurusannya didominasi oleh orang berusia lanjut. Karena keberadaan KSU Nian Ue Weri diharapkan bisa menjadi mobilisator pengembangan kegiatan pengelolaan.
- *Koperasi terdaftar secara resmi di Dinas terkait*.

  Koperasi sudah mengajukan dokumen untuk pendaftaran pada Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT tetapi sampai saat ini statusnya belum teregistrasi. Namun demikian, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT telah menunjukkan perhatiannya untuk peningkatan kapasitas koperasi ini. Pada tanggal 9 – 11 Oktober 2019 pengurus koperasi dilibatkan dalam pelatihan pengembangan kelembagaan koperasi sector riil yang dilaksanakan di Maumere.

Aktivitas 1. Lokakarya penyusunan tools dan metode pelaksanaan monitoring kegiatan pengelolaan HKm.

Penyusunan tools monev terlaksana tanggal 5 Juni 2019. Yang terlibat dalam penyusunan tools sebanyak 19 orang, 5 di antaranya perempuan. Mereka adalah pengurus Koperasi Nian Ue Wari, dan pengurus hamparan. Tool monev diadaptasikan dari tool monev Perhutanan Sosial (PS) untuk disesuaikan dengan kondisi local. Ada bagian-bagian tertentu dari penyataan monev yang tidak relevan dan hal seperti itu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan karena tool Monev PS memang berlaku untuk semua skema PS, sehingga ketika ingin diaplikasikan pada HKm maka dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Empat aspek yang dimonev yaitu : aspek pra-syarat, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial.

Dalam lokakarya ini juga disepakati pembagian tim dan jadwal untuk melakukan monev.

Hamparan	Tempat Kegiatan	Ketua Kelompok dan Anggota
Tige Gulo	Pondok Bapak Yohanes Yonas	Sius Liwu Yohanes Jonas Yuventa Ani Soge Thomas Uran
Kaliraga 1	Pondok Bapak Alfons Ojan	Gabriel Keso Phipus Pelipi Leonardus Elu Ardiana Lidya
Waturuha	Pondok Bapak Blasius Jampi	Marianus Dare Bernabas woda Ibu Agnes Lango Mikael Puka
Terang Gete	Pondok Bapak Frans Lewo Iri	Agustinus Adeo Datus Yohanes Lena Fransiskus Sere Liwu
Kaliraga 2	Pondok Bapak Gela Liwu	Sipri Blolon Anton Lado Imelda Liwu Magdalena Tolok

Kegiatan Monev disepakati dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 dengan pertimbangan ada sebagian anggota Tim Monev adalah dari unsure pemerintah desa. Hari Sabtu adalah hari bebas tugas di desa. Pleno hasil Monev disepakati dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juni 2019.

Dilaksanakan tanggal 5 Juni 2019, melibatkan 19 peserta dengan menyapakati tool monev**.**

Aspek yang dimonitoring:

a. Aspek Prasayarat :

Aspek prasyarat lebih menitik-beratkan pada persyaratan utama terhadap kelompok PS yang akan dilakukan monitoring/evaluasi yaitu terkait dengan adanya dokumen rencana kerja (Rencana Kerja Umum dan Rencana Kerja Tahunan atau dengan sebutan lain).

b. Aspek Produksi dan Ekonomi :

Aspek produksi dan ekonomi akan memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok PS selama ini khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan serta pemanfaatannya. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: Tata kelola sumberdaya hutan, Tata kelola hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, Usaha ekonomi hasil hutan.

c. Aspek Ekologi

Aspek ekologi lebih menitik beratkan kepada aspek keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya hutan dalam konteks kelestarian pengelolaan sumber daya hutan. Beberapa indikator yang di evaluasi antara lain kondisi hutan itu sendiri, keanekaragaman hayati (spesies), kondisi hidrologis dan keamanan hutan. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut : Fungsi dan status kawasan hutan dapat dipe rtahankan sesuai peruntukannya, Keanekaragaman jenis dan produk sumberdaya hutan terjaga/meningkat, Perbaikan kondisi hidrologis, Perlindungan hutan.

d. Aspek Sosial

Aspek sosial dilakukan untuk melihat permsalahan yang terkait dengan sosial ekonomi yang telah berjalan selama ini seperti tingkat kesejahteraan, kelembagaan, perilaku, gender dan konflik. Adapun krietrianya adalah sbb : Peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa, Penguatan kelembagaan, Perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola, Resolusi konflik, Kesetaraan Gender, Kontribusi pengelolaan hutan terhadap Desa/masyarakat.

Aktivitas 2. Pelaksanaan monitoring kegiatan pengelolaan HKm oleh Pengurus Koperasi sebagai pemegang IUP HKm.

Dilaksanakan tanggal 8 Juni 2019 secara serempak di empat hamparan. Tim 1 berlokasi Waturuha, 36 petani, Terang Gete 22 petani, Tige Gulo 24 petani, Kaliraga 24. Total petani yang terlibat sebanyak 106 orang. Nilai yang diperoleh masing-masing hamparan adalah sebagai berikut:

Hamparan	Total Nilai	Prosentase	Kwalitatif
Tige Gulo	661	69,07	Sedang

Kaliraga	519	54,2%	Sedang
Terang Gete	762	79,6 %	Sedang
Waturuha	706	73,7%	Sedang

BAB IV
PERUBAHAN

1) Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas

Nama species prioritas	Ancaman	Status	Dokumen verifikasi
Srindit Flores	Perusakan habitat serindit dengan praktek kebun berpindah, dan pola tebas bakar.	Pembuatan baliho aturan masuk kawasan HKm	

2) Peningkatan Pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang mendapatkan peningkatan pengelolaan	Dokumen verifikasi
Ili Wengot	Terlaksananya konservasi dengan anakan Bambu Betung, Kopi Robusta, Sengon sebagai pelindung kopi dan aneka tanaman buahan2.	Kaliraga 90 Ha, Baologun 50 Ha dan Tige Gulo 30 Ha. Total 170 Ha	

3) Perlindungan kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan / Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
Ili Wengot	Hutan Lindung	SK Menteri Kehutanan RI Nomor 124/KPTS-II/90, seluas 12.960 Ha dalam RTK 126	

4) Penerima manfaat

a) Karakteristik penerima manfaat

	Jenis Komunitas										
Nama Komunitas	Ekonomi Subsisten	Small landowners	Masyarakat Hukum Adat/komunitas lokal	Pastoralists/nomadic people	Recent migrants	Komunitas perkotaan	Lainnya	Ukuran penerima manfaat			
								50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000	Di atas 1000 jiwa
Desa Hikong, Kabupaten Sikka	X							X			

Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur								X			
Desa Boru Kedang, Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur								X			

b) Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih		
Meningkatnya ketersediaan pangan		
Meningkatnya akses layanan public (mis. Kesehatan, pendidikan, dll)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim		
Kepemilikan lahan yang jelas	502 kk	61 kk perempuan
Pengakuan atas kearifan lokal		
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan		
Peningkatan akses atas jasa lingkungan		
Pelatihan (sebutkan jenis pelatihan yang didapat oleh penerima manfaat)	Pelatihan analisis usaha perkebunan, pelatihan teknis budidaya kopi	
Lain-lain		
Total penerima manfaat	**502 KK laki laki**	**61 kk perempuan**

5) Regulasi / kebijakan lokal

Nama Regulasi / Kebiajakan	Ruang Lingkup	Topik	Hasil yang diharapkan
Aturan pengelolaan HKm	Untuk petani dan pengunjung lokasi HKm	Aturan memasuki kawasan HKM	Ada yang mulai mengerti tentang pentingnya peningkatan ekologi kawasan

6) Jaringan kerja / forum multipihak

Nama Jaringan / Kemitraan	Ruang Lingkup	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan
BKSDA	Pulau Flores	Untuk perlindungan ketersediaan dan pemanfaatan air	2019
Dinas Koperasi UKM NTT	Propinsi NTT	Untuk pendampingan dari pemerintah	2019

7) Bentang alam produktip

Nama Bentang Alam Produktip	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktip	Luas (bagian) Bentang Alam Produktip Yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi

BAB V
PEMBELAJARAN

1) Kegiatan atau strategi apa yang berhasil dengan baik , dan apa yang kurang berhasil ? Mengapa demikian dan apa dampaknya?
2) Adakah hal atau kegiatan yang di masa depan sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda (rekomendasi) ?
3) Deskripsi dalam tabel berikut ini :

Isu	**Keberhasilan / Kurang berhasil**	**Factor penyebab**	**Dampak**	**Rekomendasi**
Hasil : a. Perubahan pengetahuan b. Perubahan sikap c. Perubahan perilaku	• ada kesadaran bersama terutama di kalangan petani pengelola untuk melakukan upaya penanaman secara bersama dalam kelompok kerja • para pihak (KPH) Flotim berencana untum mengembangkan HKM Iliwengot sebagai HKm model di	Informasi yang disampaikan secara terus tentang pentingnya upaya peningkatan ekonomi dan peningkatan mutu layanan alam, termasuk keberadaan serindit flores di area hutan lindung	Ada gagasan kerja kolaboratif para stakeholder	

	Kabupaten Flores Timur	Iliwengot secara terus menerus pada saat kegiatan kepada masyarakat dan stakeholder		
Proses : a. Perencanaan b. Pelaksanaan				

BAB VI
STATUS KEUANGAN

a. Pemasukan : Rp. 256.504.423

b. Pengeluaran : Rp. 270.132.793

c. Saldo : (Rp. 13.552.002)